

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005) tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Halim (2007:2) Berdasarkan peraturan-peraturan manajemen keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik-karakteristik antara lain :

- a. Pengertian Daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten. Istilah Pemerintah Daerah Tingkat I dan II juga kota madya tidak lagi digunakan.
- b. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah ini adalah badan eksekutif, sedang badan legislatif di daerah adalah DPRD (pasal 14 UU No. 22 Tahun 1999). Oleh karena itu, terdapat pemisahan yang nyata antara legislatif dan eksekutif.
- c. Perhitungan APBD menjadi satu laporan dengan pertanggung jawaban Kepala Daerah (Pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000). Bentuk Laporan Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran terdiri atas :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laporan Perhitungan APBD
 - Nota Perhitungan APBD
 - Laporan Aliran Kas
 - Neraca Daerah di lengkapi dengan penilaian berdasarkan tolak ukur Renstra (pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000)
- d. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang menunjukkan hakPemda) tetapi masuk dalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak Pemda)
 - e. Masyarakat termasuk didalam unsur-unsur penyusunan APBD disamping pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD.
 - f. Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup :
 - Perbandingan antara anggarn dan realisasinya.
 - Perbandingan antara standar biaya dan realisasinya.
 - Target dan persentase fisik proyek, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
 - g. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.
 - h. Digunakan akuntansi didalam pengelolaan keuangan daerah.
- Sumber-sumber pendapatan/ penerimaan daerah menurut UU nomor 32

Tahun 2004 adalah :

- a. Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja.

b. Sumber Pendapatan Daerah :

- Pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Dana perimbangan.
- Pinjaman daerah.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c. Persentase Dana Perimbangan :

Dana Perimbangan :

- 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan (PBB), Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana alokasi khusus dan Dana alokasi umum.
- 2) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, diterima langsung oleh daerah penghasil.
- 3) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dengan pembagian imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
- 5) Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
- 6) 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 20% penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari pemerintahan pusat dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.
- 7) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
- 8) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :
 - Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan perimbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.
 - Penerimaan negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang berlaku dibagi dengan perimbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (saat ini diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005) dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang telah diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (saat ini telah diperbarui lagi dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang terjadi cukup besar, namun tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan semangat reformasi, tidak radikal dan revolusioner. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian internal, laporan dan pengawasan.

Perubahan UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 menjadi UU nomor 32 dan 33 tahun 2004 menimbulkan implikasi perlunya dilakukan revisi peraturan perundang-undangan dibawahnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti PP Nomor 105, PP Nomor 108, dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Sementara itu, pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Mahmudi (2006:29) pada dasarnya antara PP Nomor 24 Tahun 2005 mengatur tentang standar akuntansi, sedangkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 lebih banyak mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Menurut salim (1999:32) faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha nelayan meliputi sektor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya modal,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

jumlah tenaga kerja, pengalaman kerja dan teknologi. Kemudian Halim (2007:42) pada organisasi Pemda laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh PP Nomor 105 Tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) dan lampiran butir (11) peraturan tersebut diperbaharui dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007).

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (*Non-PAD*) sifatnya lebih terikat.

Di dalam penerimaan sumber keuangan, selain daerah di beri sumber-sumber keuangan dari pusat, mereka juga diberi kewenangan untuk menggali potensi daerahnya dengan sumber keuangan dan memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, artinya daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya dengan menggunakan keuangannya sendiri, menunjukkan sampai seberapa jauh daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah pusat dalam membiayai kepentingan rutin, oleh karena itu daerah harus berusaha semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pembiayaan dari pendapatan asli daerah (*PAD*) nya sendiri.

Dalam meningkatkan *PAD*, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

2.3. Potensi Wilayah

Menurut Miraza (2005:58) Wilayah adalah kumpulan daerah berhampiran, sebagai satu kesatuan geografis dalam bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia serta posisi geografis yang dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisiensi dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah diatas mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudi dayaan ikan yang potensial, semua itu merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (UU RI No. 27 Tahun 2007). Pada dasarnya wilayah pesisir tersusun dari berbagai ekosistem, seperti *mangrove*

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Hutan Bakau), terumbu karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya, yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri.

Menurut Dahuri et al (1996:32) hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai (*boundaries*) batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*).

Kunzrann (2001:18) menyebutkan bahwa Asia Tenggara merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia karena banyaknya species persatuan luas. Disebutkan bahwa di dunia ini terdapat sekitar 800 jenis karang dan sekitar 4000 jenis ikan.

Dalam UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa potensi di kawasan pesisir sangatlah besar, baik potensi sumber daya alam maupun potensi buatan. Potensi sumberdaya kawasan pesisir menurut UU ini yaitu sumber daya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain), sumberdaya nonhayati (pasir, air laut, mineral dasar laut), sumberdaya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Holthus (1999:17) melaporkan bahwa ekonomi di hampir semua Negara sangat bergantung pada keuntungan (*benefits*) yang diperoleh dari laut dan pesisir,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Amerika Serikat, seperti gadari GDP (*Gross Domestic Product*) dihasilkan dari wilayah pesisir, dan satu dari enam pekerjaan berkaitan dengan lautan.

Dahuri (2002:48) mengemukakan bahwa besar pembangunan perikanan dan kelautan dapat ditunjukkan oleh sumbangannya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Dengan menghitung 7 sub-sektor yang masuk kedalam sector kelautan, ia menunjukkan bahwa sumbangan kelautan terhadap PDB nasional pada tahun 1995 adalah 12,32% dan pada tahun 1998 adalah 20,6%. Dengan demikian kontribusi terhadap PDB serta penyerapan tenaga kerja dapat digunakan sebagai attribute konomi yang berkaitan dengan pembangunan pulau-pulau kecil berkelanjutan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan mengarah kepada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh (Conrad dan Clark,1989:90).

2.4. Potensi Sektor Perikanan

Tanah air Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan luas laut sekitar 3.100.000km², yakni terdiri dari perairan laut nusantara 2.800.000 km² dan perairan teritorial seluas 300.000km² ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut Indonesia adalah 5.200.000km². Ternyata wilayah Indonesia merupakan yang terluas diantara Negara-negara Asia, sedang garis pantai panjangnya 81.000 km² merupakan garis pantai terpanjang didunia.

Salah satu sumber daya alam hayati Indonesia terletak dibidang perikanan baik itu dari perikanan laut (ikan tangkap) termasuk di dalamnya bermacam-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam kegiatan seperti menyimpan, mendinginkan, mengawetkan maupun mengelolanya yang kemudian diekspor ke luar negeri, perikanan darat (tambak, waduk, jaring, rawadan sejenisnya). Kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia.

Definisi perikanan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Pembangunan disektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Usaha untuk mencapai tujuan pokok pembangunan perikanan yaitu untuk :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas.
- b. Peningkatan kesejahteraan petani ikan (nelayan) melalui perbaikan pendapatan.
- c. Penyediaan lapangan kerja.
- d. Menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan.
- e. Pola manajemen dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. ZEE
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensi wilayah republik Indonesia.

Budiharsono (2001:26) menyebutkan pentingnya ilmu pembangunan wilayah dalam konteks pembangunan di Indonesia dan wilayah pesisir pada khususnya di karenakan oleh :

- a. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana kegiatan-kegiatan pembangunan saat ini dipusatkan dibagian barat. Konsentrasi demikian menimbulkan isu pengembangan wilayah ‘*outer island*’ yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berdimensi wilayah.
- b. Pembangunan masa lalu lebih menitik beratkan pada pembangunan daratan dari lautan, sehingga pembangunan pesisir relatif tertinggal. Masyarakat pesisir relatif lebih miskin dari wilayah daratan lainnya. Kondisi ini di perburuk dengan posisi politik nelayan yang relatif lemah dibanding dengan posisi lainnya.
- c. Letak geografis Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh faktor geologis dan ekologis yang menyebabkan keragaman lingkungan.
- d. Keragaman kultural menyebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap pembangunan.
- e. Sifat pembangunan politik di Indonesia yang di warnai oleh kekuatan politik wilayah.

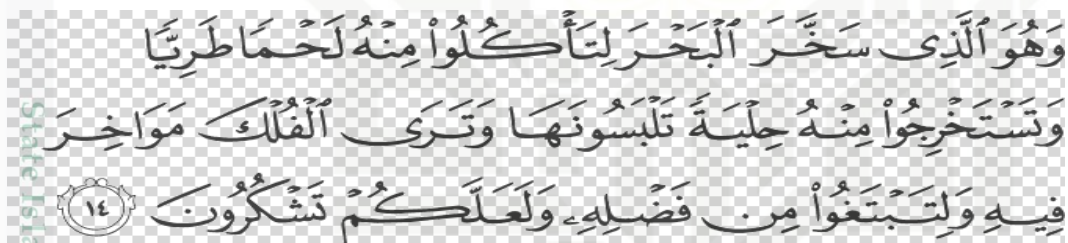
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang merupakan antisipasi terhadap maraknya tuntutan lepasnya beberapa daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan pemerintah dapat membangun sesuai kebutuhan dan kemampuannya sendiri.
- g. Pembangunan Indonesia masih bersifat sektoral, sehingga hasil yang dicapai tidak optimal.

2.5. Pandangan Islam Tentang Pembangunan

Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, dari berbagai aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Berikut firman Allah SWT tentang potensi perikanan dalam QS. Al-Nahl (16:14) seperti berikut :



Artinya : “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah SWT telah menciptakan lautan yang didalamnya ada ikan. Kemudian Allah memerintahkan untuk kita memanfaatkan potensi perikanan supaya mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Untuk itu penting adanya kesadaran akan kita semua sebagai umatnya untuk memanfaatkan potensi yang ada salah satunya yaitu perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.6. Definisi Konsep

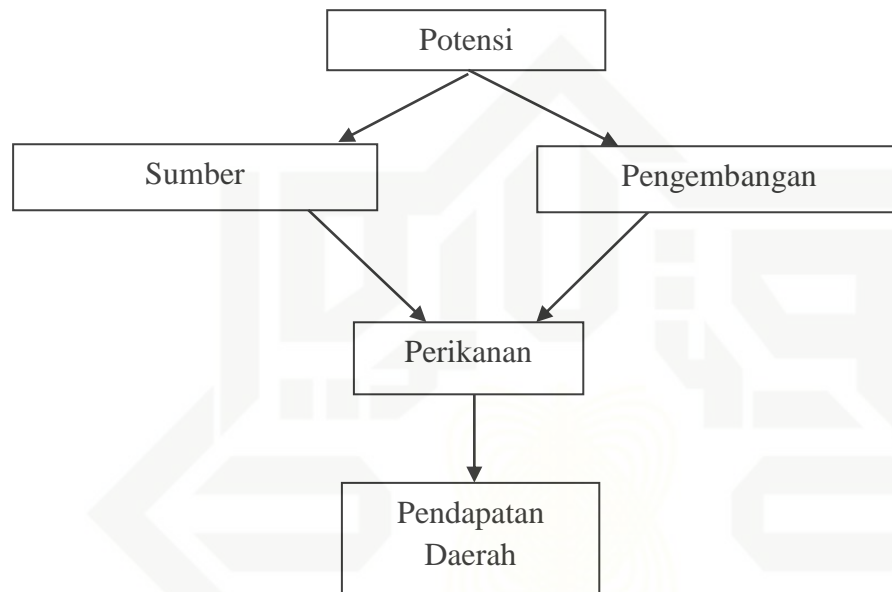
- a. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Wilayah adalah kumpulan daerah berhampiran, sebagai satu kesatuan geografis dalam bentuk dan ukurannya.
- c. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa di kembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran (*majdi : 2007*)
- d. Pengertian potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuat tersebut belum tersingkap dan belum di aktifkan, atau keberhasilan yang belum di raih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut (*myles munroe*)

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) Kerangka pemikiran atau biasa disebut dengan kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka ataupun peraturan yang ada kemudian memaparkan hasil yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka pemikiran ini terdiri dari 3 proses, yaitu Input, Proses dan Output. Pada kerangka pemikiran ini peneliti membuat alur berfikir sebagai berikut :



2.7. Penelitian Terdahulu

- a) Adhinda dewi agustine (2014) Universitas Brawijaya, Malang. Dengan judul penelitian “Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi” hasil penelitiannya yaitu : Bahwa Sektor kelautan dan perikanan ber-kontribusi dalam PAD, yang dilihat dari 5 tahun terakhir (2008-2012) dengan rata-rata kontribusi sebesar 21% atau Rp 190.275.925. Adapun kontribusi dilihat dari faktor pendukung dan penghambat pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang sebagian besar untuk faktor penghambat berasal dari sarana prasarana yang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak pakai dimana sarana tersebut dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, untuk faktor pendukung berasal dari pembinaan atau diklat pegawai dalam rangka menambah pengetahuan serta keterampilan di masing-masing bidang kelautan dan perikanan. Solusi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendidikan, latihan dan penyuluhan yang mengikutsertakan tidak hanya pegawai dinas kelautan dan perikanan melainkan juga dari nelayan, masyarakat petani ikan di pelosok-pelosok daerah. Kemudian perlu didirikan KUD bagi nelayan yang diperlukan untuk pembelian kapal motor, promosi dan perbaikan alat-alat tangkap. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk lebih cepat menangani segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dan pembudidaya ikan, serta menambah adanya ke- lengkapan pendukung untuk para nelayan dalam menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari dan distribusi dana bantuan yang merata pada nelayan-nelayan di daerah juga bisa dilaksanakan.

- b) Muhammad taufik sidik (2016) Universitas Hasanudin, Makassar. Dengan judul penelitian “Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Manjene” hasil penelitiannya yaitu : Pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu yang di paparkan dapat di lihat dari aspek pelaksanaannya, penelitian terdahulu tersebut lebih meneliti tentang pengembangan sektor kelautan dan perikanan kontribusi dilihat dari faktor pendukung dan penghambat pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang sebagian besar untuk faktor penghambat berasal dari sarana prasarana yang tidak layak pakai dimana sarana tersebut dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, sedangkan penelitian-penelitian ini membahas tentang program nasional yang wajib dilaksanakan oleh setiap desa pada NKRI yang diselenggarakan setiap tahunnya yang didanai oleh APBD dan di atur oleh kebijakan publik.